



## DKI Diminta Laporkan Anggaran Formula E

**Saat pembahasan P2APBD 2021 tidak ada laporan keuangan Jakpro untuk Formula E. Dirut Jakpro juga tidak memberi penjelasan transparan.**

JAKARTA - Anggota DPRD DKI, Syahrial, mendesak Pemerintah Provinsi DKI segera menerbitkan laporan keuangan penyelenggaraan Formula E sebagai bentuk transparansi anggaran karena sampai kini belum pernah disampaikan kepada publik. "Sejak 2019 sampai sekarang tidak pernah mendengar atau mendapat laporan Gubernur mengenai pelaksanaan Formula E," kata Syahrial dalam rapat paripurna yang salah satunya membahas Penyampaian Pertanggungjawaban (P2) APBD 2021 di Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut dia, rapat paripurna kali ini menjadi momentum untuk minta jawaban dari Pemprov DKI Jakarta. Sebab, masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria berakhir 16 Oktober. Saat menyampaikan interupsi, anggota Komisi C DPRD DKI tersebut mengaku tidak pernah mendapat informasi akurat terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.

"Seberapa banyak dana yang sudah digelontorkan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Formula E. Kami menuntut supaya diberikan informasi se jelas-jelasnya proses anggaran Formula E," tandasnya. Syahrial mendesak BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara ajang ba-

lap mobil listrik itu dan Pemprov DKI memberi penjelasan transparan terkait laporan keuangan Formula E.

Senada dengan Syahrial, anggota Komisi B DPRD DKI, Wa Ode Herlina, juga mendesak laporan keuangan termasuk rugi laba penyelenggaraan Formula E. "Saat pembahasan P2APBD 2021 tidak ada laporan keuangan Jakpro terkait pengeluaran Formula E. Ketika ditanya, Dirut Jakpro juga tidak memberikan penjelasan transparan. Saat ini penyelenggaraan Formula E sudah selesai, tapi tidak ada laporan keuangan, rugi laba kepada publik," ucapnya.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, pelaksanaan Formula E Jakarta dilakukan selama tiga musim, yakni 2022-2024 setelah renegotiasi dari awalnya lima musim, yaitu 2020-2024, akibat pandemi. Adapun total biaya komitmen yang disetorkan kepada Formula E Operation (FEO) selaku operator sekaligus pemegang lisensi Formula E, mencapai 31 juta poundsterling atau setara 560 miliar dari total 36 juta poundsterling.

Sisanya sebesar 5 juta poundsterling berdasarkan laporan BPK DKI Jakarta akan dibayarkan oleh Jakpro selaku penyelenggara di Jakarta pada tahun ketiga, tanpa melalui APBD.

### Anies Diperiksa

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies mengatakan tidak memiliki persiapan khusus menjelang diperiksa KPK terkait penyelenggaraan Formula E. "Datang saja, tidak ada persiapan khusus," kata Anies.

Namun dia enggan menanggapi lebih lanjut pertanyaan

wartawan terkait akan diperiksa KPK, Rabu (7/9) ini. KPK melayangkan surat panggilan ke Anies untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan ajang balap mobil listrik.

"Saya menerima surat panggilan KPK, Rabu, 7 September pagi," katanya saat menghadiri pemotongan kabel udara untuk proyek utilitas di Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (5/9). Dia menegaskan akan datang memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan terkait Formula E.

Sebelumnya, KPK masih melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. "Belum disetop kasusnya," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/8). Ali mengatakan KPK masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi sesuai dengan koridor hukum.

■ Ant/jon/G-1